

**KAJIAN BUDAYA LOKAL
PADA KURIKULUM IPS DALAM
PERSPEKTIF GLOBAL**

**MAKALAH DISAJIKAN DALAM SEMINAR PENDIDIKAN PIPS 2007
SEKOLAH PASCA SARJANA UPI**

**Oleh.
Nana Supriatna
Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia**

KAJIAN BUDAYA LOKAL PADA KURIKULUM IPS DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

**Oleh
Nana Supriatna¹**

Abstrak

Kajian budaya lokal merupakan langkah penting dalam implementasi kurikulum IPS guna menyiapkan para peserta didik di sekolah agar mereka memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menghadapi era globalisasi. Kurikulum IPS yang dimaksud dalam makalah ini bukan sebagai sebuah dokumen untuk disampaikan kepada peserta didik (*curriculum as a document*) - seperti halnya yang dianut oleh pamikir positivistik-modernistik – melainkan kurikulum sebagai sebuah praksis (*curriculum as a praxis*) atau proses interaksi dan dialog antara pendidik dan peserta didik dengan dokumen kurikulum yang ada - sebagaimana dianut oleh para pemikir pedagogi kritis (*critical pedagogy*) dalam paradigma *postmodernism*. Melalui pengertian kurikulum yang terakhir tersebut, unsur-unsur budaya lokal seperti kearifan lokal (*local wisdom*) yang diwariskan sejarah kepada para guru dan siswa di lingkungan setempat serta sebagai pengetahuan yang diperoleh dari beragam sumber dapat dimasukkan dan dikaji lebih lanjut tanpa mengubah

¹ **Nana Supriatna, M.Ed.** adalah dosen Pend. IPS (D-II, S-1 dan S-2) FPIPS dan Sekolah Pascasarjana UPI; alumni Deakin University, Melbourne, Australia; penulis buku teks IPS dan PKN untuk SD, dan SMP serta Sejarah untuk SMA, dan mengajar Strategi Belajar Mengajar IPS/Sejarah, Perspektif Global dan Analisis Kurikulum IPS. Penulis adalah peneliti Kartun Propaganda Jepang (1942-1945) atas sponsor *Sumitomo Foundation* Jepang, dan hasilnya digunakan sebagai media pembelajaran IPS.

Penulis dapat dihubungi pada kantor di FPIPS UPI, Jl. Dr. Setiabudhi 229, Bandung, Ph. 022.2013163, ext. 2510. atau
Rumah: Jl. Wangsapraja Wetan 10, Kotabaru Parahyangan, Jawa Barat, ph. 022-6803250, dan 081 320 497 497, E-mail: nanasup@yahoo.com

standard isi kurikulum yang sudah ada. Dalam kurikulum IPS sebagai sebuah praksis ini, unsur-unsur budaya lokal bisa diseleksi dan dikaji lebih lanjut untuk menumbuhkan perspektif global. Makalah ini akan menguraikan kajian tentang pengaruh nilai-nilai budaya terhadap perkembangan masyarakat di era global yang bisa dikembangkan dalam kurikulum IPS sebagai sebuah praksis. Budaya lokal yang dimaksud adalah unsur-unsur seperti nilai, sikap dan perilaku, keyakinan, orientasi, dan anggapan umum yang menyebar di kalangan masyarakat pada sebuah negara. Partisipasi masyarakat di era global ditandai dengan kemampuan mereka beradaptasi dengan tuntutan global karena unsur-unsur budaya lokal yang mereka miliki seperti etos kerja serta *entrepreneurship* mendukung kemampuan beradaptasi tersebut. Uraianannya akan menggunakan kategori yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein² yaitu pembagian negara-negara dalam kawasan berdasarkan tingkat kemakmuran, yaitu negara-negara inti, semi-periphery dan periphery. Kategori tersebut didasarkan atas kemampuan ekonomi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal, baik nilai-nilai intrinsik maupun instrumental. Masing-masing negara yang digolongkan ke dalam kategori di atas memiliki derajat yang berbeda dalam menggali budaya lokal mereka untuk digunakan guna menghadapi globalisasi dan hal tersebut merupakan materi yang menantang dalam kurikulum IPS.

1. Pendahuluan

Budaya lokal yang dapat dikaji dan dikembangkan dalam kurikulum IPS sebagai sebuah praksis dalam makalah ini adalah segala sesuatu yang menyangkut unsur-unsur seperti nilai, sikap dan perilaku, keyakinan, orientasi, dan anggapan umum yang menyebar di kalangan masyarakat. Sikap hidup masyarakat yang nampak dalam simbol, tindakan sehari-hari, institusi serta relasi sosial juga termasuk sebagai

² Immanuel Wallerstein, 'The Modern World System', dalam Gardner, 2000, *Social Theory: Continuity and Confrontation A Reader*, Broadview Press, New York, pp. 528-535.

bagian dari unsur budaya lokal. Semuanya memiliki pengaruh terhadap perkembangan manusia (*human progress*) pada bangsa-bangsa di dunia. Secara khusus, makalah ini ingin melihat pengaruh nilai-nilai budaya lokal yang dimiliki oleh beberapa negara terhadap perkembangan ekonomi global yang terjadi di beberapa kawasan dunia yang bisa menjadi kajian dalam kurikulum IPS dalam perspektif global.

Menurut Talcott Parsons (1959)³ nilai (*value*) dalam budaya lokal dapat didefinisikan sebagai sebuah unsur dalam sistem simbolik konvensional yang berperan sebagai kriteria untuk melakukan pilihan di antara berbagai alternatif yang tersedia dalam situasi yang mapan. Bangsa-bangsa yang memiliki budaya lokal berupa sistem nilai yang mendukung (*favourable*) dalam menghadapi berbagai tantangan akan terus berkembang. Terdapat dua kategori nilai, yaitu nilai intrinsik dan nilai instrumental. Nilai intrinsik adalah nilai yang tidak selalu memperhatikan untung dan rugi (*cost and benefits*). Patriotisme, sebagai nilai, menuntut adanya pengorbanan yang bahkan tidak menguntungkan bagi seorang individu. Sejarah mencatat bahwa berjuta-juta orang mati demi mempertahankan negaranya.

Sebaliknya, nilai bisa menjadi sebuah instrumen ketika masyarakat mendukungnya sebab nilai tersebut menguntungkan bagi mereka. Pada dasarnya, nilai-nilai ekonomi bersifat instrumental sebab nilai tersebut selalu menggunakan ukuran untung rugi. Namun, sebuah negara akan berhenti berkembang ketika keuntungan (*benefit*) serta produktifitas diraih dan tidak ada usaha lain untuk mencapai tujuan baru. Dengan demikian, nilai-nilai intrinsik sangat perlu dalam ekonomi. Sebagai contoh, dalam mengelola sumber daya alam serta mengembangkan industri untuk memperhatikan profit (nilai instrumental) harus memperhatikan kelestarian lingkungan dengan cara menghindari polusi dan lain-lain sehingga terjadi pembangunan yang berkesinambungan. Profit saja tidak cukup apabila merugikan

³ Talcott Parsons (1959) sebagaimana dikutip oleh Mariano Grondona (2000), *A Cultural Typology of Economic Development*, dalam Harrison and Huntington, 2000, *Culture Matters, How Values Shaves Human Progress*, Basic Books, New York. Pp. 44-45

kepentingan pihak lainnya. Jadi, nilai-nilai budaya tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, bahkan perkembangan ekonomi itu sendiri merupakan bagian dari proses budaya.⁴

Bahwa budaya lokal berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi sudah dikemukakan oleh banyak ahli dalam berbagai disiplin. Akan tetapi, bahwa nilai-nilai budaya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi global mengemuka setelah beberapa ahli bergabung dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan di *Harvard Academy for International and Area Studies*, Amerika Serikat, pada musim panas tahun 1998.⁵

Dalam seminar itu beberapa ahli dalam berbagai bidang mengemukakan pandangannya dan sampai pada kesimpulan bahwa budaya berpengaruh terhadap perkembangan manusia, termasuk dalam kegiatan ekonominya di berbagai kawasan dunia. Pengaruh tersebut bisa bersifat positif atau negatif. Pengaruh positif ditandai dengan adanya progress, kemajuan atau perkembangan dalam berbagai kehidupan masyarakat yang antara lain ditandai dengan meningkatnya kemakmuran, kesejahteraan, atau pendapatan. Adapun pengaruh negatif dapat dilihat dari adanya stagnasi atau bahkan regres atau mundur. Kemunduran tersebut terjadi karena nilai-nilai budaya lokal atau nasional yang dianut oleh bangsa tersebut sangat menghambat kemajuan, misalnya budaya *inward looking*, lebih melihat ke dalam daripada ke luar, mementingkan primordialisme, menonjolkan sentimen etnis dan lain-lain. Karena nilai-nilai tersebut maka masyarakat bangsa berada dalam posisi mandek, tidak berubah dan akhirnya ketinggalan dibandingkan dengan negara dan bangsa lainnya.

⁴ Mariano Grondona, 2000, 'A Cultural Typology of Economic Development', dalam Harrison and Huntington, 2000, *Culture Matters, How Values Shaves Human Progress*, Basic Books, New York. Pp. 45-46. .

⁵ Harrison and Huntington, 2000, *Culture Matters, How Values Shaves Human Progress*, Basic Books, New York. Pp. xiv-xxxiv.

2. Unsur Budaya Lokal di Kawasan Inti sebagai tantangan dalam Kurikulum IPS.

Pengkategorian negara-negara di dunia berdasarkan pengaruh unsur-unsur budaya lokal terhadap perkembangan ekonomi global oleh Immanuel Wallerstein (2000) merupakan materi yang menarik dalam praksis kurikulum IPS. Bila hal itu merupakan bahan kajian maka kurikulum IPS akan semakin kaya (*richness*) dan memiliki hubungan erat (*relation*) dengan aspek-aspek yang holistik dengan materi lain seperti halnya dikemukakan oleh Doll (1993, 1995).⁶ Terbentuknya ketiga kelompok negara sebagai negara-negara inti, semi-periphery dan periphery merupakan sebuah pelajaran menarik bahwa unsur-unsur budaya lokal telah berpengaruh terhadap perkembangan negara di dunia dalam merespons globalisasi. Pada kawasan maju (*advanced core*) terdiri dari negara-negara yang kuat secara ekonomi karena pasar dunia dan kaum kapitalis berpusat di sana. Semi-periphery mulai meninggalkan posisi berkembang ke arah yang lebih maju. Sedangkan di kawasan periphery berlokasi negara-negara yang lemah sumber daya manusia, penguasaan teknologi, pasar, kapital an akses teradap sumber ekonomi global. Kawasan tersebut menjadi daerah eksploitasi negara kuat, kapitalis dan pasar bebas. Menurut Wallerstain, terbentuknya pembagian negara ke dalam tiga kawasan disebabkan oleh perbedaan **kemampuan** serta **penggunaan nilai-nilai budaya lokal** pada negara-negara tersebut bagi kepentingan pembangunan ekonomi. Negara yang kaya adalah negara yang mampu memanfaatkan nilai-nilai budayanya untuk meningkatkan kesejahteraan.

⁶ Doll, 1993, *A Post-Modern Perspective on Curriculum*, tersedia dalam <http://www.great-ideas.org/30-5html>, tanggal 27 Februari 2005. Lihat juga Doll, 1995, 'Curriculum Possibilities, A "Post" Future', in Conrad and Haworth, 1995, *Revisioning Curriculum in Higher Education*, Simon & Hustler Custom Publishing, Massacusset.

Sebaliknya, negara miskin adalah negara yang memiliki **hambatan budaya** atau tidak mampu memanfaatkan nilai-nilai budaya bagi kemajuan ekonomi bangsanya. Negara-negara inti terdiri dari Eropa Barat, Amerika Utara dan Jepang. Negara semi-periphery terdiri dari negara-negara industri baru seperti Korea, Taiwan, Singapura, China dan lain-lain di Asia serta Meksiko, Brazil dan Argentina di Amerika Latin, serta Afrika Selatan di Afrika. Adapun negara periphery terdiri dari negara-negara sisa diluar kedua kawasan di atas.

Perlu disadari oleh para pengembang kurikulum IPS bahwa pada negara-negara inti dan semi-periphery unsur-unsur budaya lokal berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi bangsanya bahkan terhadap perkembangan ekonomi global. Di Eropa dan Amerika Utara, unsur peradaban Barat sebagai bagian dari kebudayaan mereka berpengaruh terhadap kemajuan bangsa-bangsa tersebut. Kini, negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara telah mendominasi ekonomi dunia. Menurut Huntington (1996),⁷ unsur-unsur kebudayaan Barat yang berpengaruh terhadap kemajuan mereka terdiri peradaban moderen yang mereka gali dan kembangkan sejak abad ke-15 yaitu berupa kajian kembali terhadap karya-karya klasik Yunani, renaissance, reformasi gereja serta lahirnya agama Protestan yang diaplikasikan dalam kehidupan ekonomi. Unsur-unsur peradaban tersebut - yang semula merupakan unsur budaya lokal negara-negara Barat - terdiri dari:

1. Warisan peradaban klasik yang menjunjung tinggi rasionalisme dalam berpikir dan bertindak.
2. Katolisisme dan Protestanisme. Kedua agama tersebut sebenarnya bersumber pada ajaran yang sama. Akan tetapi sepanjang perkembangannya mengalami perubahan terutama sejak jaman renaissance yang memisahkan dengan tegas antara Katholik dan Protestan. Walaupun kedua aliran agama tersebut berada

⁷ Huntington, Samuel P, 1996, *The Clash of Civilizations, and the Remaking of World Order*, Prentice Hall, New York. pp. 120-128.

pada pihak yang bertentangan terutama sejak Reformasi, keduanya mewarnai peradaban Barat. Peradaban tersebut mempengaruhi peradaban lainnya terutama sejak bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi ke seluruh dunia dengan mengatasnamakan *Gospel, Glory* dan *Gold*.

3. Bahasa Eropa yang berkembang di banyak negara. Bahasa-bahasa tersebut juga sangat rasional dan tidak membedakan hirarki dalam tata bahasanya. Hal ini memudahkan para penuturnya untuk menyampaikan gagasan dan pikiran sehingga memudahkan berkomunikasi termasuk mengkomunikasikan kesempatan ekonomi.
4. Pemisahan antara negara dengan gereja. Selama ratusan tahun, gereja Eropa tidak terpisahkan dari negara. Akan tetapi setelah mengalami reformasi, gereja terpisah dari negara terutama di kalangan Protestan. Pemisahan ini menandai lahirnya peradaban Barat yang moderen, dan dibedakan dengan peradaban lain seperti China yang mengakui kaisar sebagai Tuhan, dan Orthodox yang menjadikan Tuhan sebagai partner raja. Dalam hal ini peradaban Barat hampir sama dengan Hindu yang memisahkan antara agama dan politik.
5. Peran hukum. Hukum Barat bersumber pada hukum Romawi. Tradisi hukum yang tegas merupakan landasan bagi lahirnya konstitusionalisme, perlindungan HAM, termasuk hak milik dari kesewenang-wenangan penyelenggara kekuasaan. Berbeda dengan peradaban lainnya, peradaban Barat telah menjadikan hukum sebagai pembentukan pola pikir dan perilaku masyarakat. Dengan ditegakkannya hukum maka hambatan-hambatan untuk menuju kemajuan dapat dihilangkan. Kepastian hukum dalam bidang ekonomi telah memberi jalan bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan kegiatannya.
6. Pruralisme sosial. Sejak lama kelompok-kelompok masyarakat Eropa telah memiliki otonomi dalam mengaktualisasikan hak, kepentingan, serta identitas budayanya tanpa diintervensi oleh kekuatan lain. Dalam sejarahnya, golongan aritokrat, petani dan pedagang telah memainkan peran pentingnya dan diakui

eksistensinya. Pluralisme yang otonom dan egaliter ini merupakan modal bagi terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) di Eropa dan berbeda dengan peradaban lainnya yang memiliki sentralisasi birokrasi pada sekelompok kecil penguasa.

7. Warisan-warisan representatif. Menurut Huntington, pluralisme sosial berkembang di wilayah-wilayah perkebunan, di kalangan parlemen dan insitusi-institusi lainnya yang mempresentasikan kepentingan-kepentingan aristokrasi, pendeta, kaum tani, pedagang dan lain-lain. Semua bentuk representasi tersebut menjadi ciri sistem moderen yang tidak dimiliki oleh peradaban lainnya. Hal inilah yang membawa bangsa-bangsa Eropa Barat menuju kemajuan, termasuk dalam bidang ekonomi.
8. Individualisme. Individualisme yang diakui dalam peradaban Eropa ditandai dengan pengakuan hak-hak serta kebebasan perorangan. Konsep persamaan hak yang bersumber pada ajaran filsafat Eropa abad ke-18 dan diaktualisasikan secara pragmatis dalam Revolusi Perancis menjadikan individualisme sebagai ciri peradaban moderen.

Dengan nilai-nilai budaya tersebut, kawasan Eropa Barat telah menjadi kawasan yang dihuni oleh negara dan bangsa yang maju. Mereka telah menguasai ekonomi global, informasi ekonomi dan teknologi serta menjadi pusat perputaran uang dunia. Dengan kebudayaan yang mereka miliki, dapat dikatakan bahwa Eropa sejak lama telah menguasai dunia di bidang ekonomi pasar, keuangan dan teknologi.

Selain negara-negara Eropa, Jepang di Asia termasuk ke dalam wilayah inti menurut pendapatnya Wallerstein. Negara yang kini merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia dan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di beberapa kawasan dunia tersebut telah banyak belajar dari peradaban Eropa Barat terutama sejak mereka menjalankan *Restorasi Meiji* pada tahun 1867-1868. Dalam restorasi tersebut, bangsa Jepang mampu memadukan kebudayaan tradisional yang dimilikinya dengan kebudayaan baru yang mereka pelajari dari Barat. Segera setelah menghidupkan kembali *tradisi Tokogawa*, Jepang mengundang ahli-ahli Barat sambil

mengirimkan para pelajarnya untuk belajar mengenai kemajuan bangsa-bangsa tersebut.⁸ Kemajuan industri Barat yang ditandai dengan berkembangnya kapitalisme, individualisme dan semangat kompetisi dapat dipadukan *Semangat Bushido*. Semangat tersebut meliputi etika kerja keras, hemat, menjunjung tinggi warisan nenek moyang serta tradisi kerajaan, semangat menghadapi masa depan dan kekeluargaan. Selain itu, Jepang juga memiliki agama Shinto yang disebut oleh Robert N Bellah sebagai *Tokugawa Religion*. Dalam agama tersebut, semangat kerja keras sangat ditekankan. Akibatnya, melalui perpaduan antara dua peradaban tersebut bangsa Jepang menjadi bangsa yang maju di bidang ekonomi. Kini Jepang menjadi salah satu negara paling maju yang telah menguasai tiga mesin globalisasi yang dikemukakan oleh Micklethwait dan Wooldridge (2000) yaitu pasar modal, teknologi dan majamemen keuangan internasional.⁹ Dengan nasionalisme yang tinggi, bangsa Jepang lebih memilih produk industrinya dibandingkan dengan produk import. Kebudayaan lokal dan nasional mereka bersumber pada warisan kerajaan lama telah membekali rakyatnya untuk mengutamakan hal-hal yang berbau Jepang termasuk simbol-simbol budaya lokal yang mereka ciptakan sendiri melalui penguasaan teknologi informasi.

Faktor lain yang mempengaruhi kemajuan bangsa Jepang adalah semangat belajar. Ternyata walaupun mereka telah memiliki keunggulan dari guru mereka sendiri, yaitu negara-engara Barat, mereka tidak meninggalkan tradisi belajar dari manapun. Dengan kata lain, setiap individu bangsa Jepang telah mampu mengembangkan manajemen bagi dirinya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Hatten and Rosenthal (2001)¹⁰ pengetahuan merupakan modal untuk menghadapi masa depan serta memenangkan persaingan di era global. Bangsa Jepang bisa menjadi *leader* atau pemimpin bagi dirinya sendiri dengan cara memenej diri untuk

⁸ David Landes, 2000, 'Culture Makes Almost All the Difference', dalam Harrison and Huntington, 2000, *Culture Matter*, op.cit. pp. 7-10.

⁹ Micklethwait and Wooldridge (2000), *A Future Perfect, The Challenge and Hidden Promise of Globalization*, Crown Bussiness, New York. Pp. 29-77.

¹⁰ Hatten and Rosenthal, 2000, *Reaching for the Knowledge Edge*, American Management Association, New York, pp: 3-6.

meningkatkan kualitas dirinya. Dalam *management*, cara itu dapat dilakukan dengan *sharing knowledge, stretching with knowledge, dan seeking new knowledge* sehingga kemajuanpun dapat diperoleh baik kemajuan untuk korporasi maupun kemajuan individual seperti dikemukakan oleh Hatten dan Rosenthal di atas. Jadi, budaya belajar bangsa Jepang telah membawa mereka dalam posisi seperti sekarang di era global ini.

Lahirnya budaya belajar juga tidak bisa dilepaskan dari sistem persekolahan. Sekolah di Jepang sangat menjunjung tinggi etika walaupun agama tidak menjadi pelajaran resmi di sekolah. Selain itu, pelajaran sejarah yang menekankan pada upaya menanamkan rasa cinta para tanah air, bangsa serta kaisar, diaplikasikan pada semangat patriotisme dalam pekerjaan. Sebagai contoh salah satu buku teks yang diterbitkan pada tahun 1930-an berisi ungkapan berikut: “cara yang paling mudah mempraktekkan patriotisme adalah dengan mendisiplinkan diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi nama baik keluarga dan memegang tanggungjawab dalam pekerjaan”.¹¹ Pengaruh budaya tersebut berlangsung sampai sekarang ketika bangsa Jepang telah unggul atas bangsa-bangsa lainnya, termasuk atss bangsa Eropa.

Pengaruh unsur-unsur budaya tidak hanya nampak pada bangsa Timur seperti Jepang melainkan juga Barat seperti Amerika Serikat. Negara yang kini menjadi yang paling kuat di bidang ekonomi dan perdagangan tersebut juga tidak lepas dari unsur pengaruh budaya. Salah satu unsur budaya yang berpengaruh itu nampak pada analisis Max Weber dalam tesisnya mengenai *Protestant Ethic and the Spirit of Capitalisme*.¹² Weber menganggap bahwa munculnya kapitalisme di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dipengaruhi oleh orang-orang Protestant dari Eropa Barat yang bermigrasi ke benua Amerika sejak abad ke-17 sampai abad ke-19. Sebagian besar dari imigran tersebut adalah penganut Protestan yang lahir setelah terjadinya

¹¹ David Landes, 2000, *op.cit.* p. 10.

¹² David Lasdes, 2000, *ibid*, pp. 11-12.

Reformasi Gereja di Eropa. Salah satu kelompok Protestan itu adalah penganut Calvin.

Menurut Weber, penganut Calvin termasuk kelompok Protestan yang saleh beragama, suka bekerja keras, hemat, jujur, suka menabung, tidak minum-minuman keras serta disiplin. Ternyata sikap hidup tersebut sesuai dengan tuntutan agama mereka. Para penganut Calvin percaya bahwa mereka akan menjadi orang terpilih oleh Tuhan apabila mereka mampu menumpuk kekayaan (*capital*) yang banyak di dunia. Apabila mereka mampu melakukannya maka mereka yakin bahwa mereka telah dipilih oleh Tuhan. Jadi, doktrin agama tersebut telah menjadi cara hidup sekular yang direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari seperti nampak pada sikap kerja keras, jujur, serius, dan hemat dalam menggunakan waktu serta uang. Menurut Weber, dalam jangka satu atau dua generasi, cara hidup seperti ini telah melahirkan kapitalisme. Mereka yang memiliki sikap tersebut telah mampu menumpuk kapital dan menunjukkan keunggulannya terhadap kelompok masyarakat lainnya yang tidak memiliki sikap seperti itu.

Kini, tesis Weber tersebut sering digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan mengapa negara-negara yang menganut Protestant di Eropa Barat serta Amerika Serikat, Kanada dan Australia menjadi negara kapitalis dan menguasai ekonomi dunia. Ternyata sumbernya adalah ada pada ajaran agama yang mereka anut serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kapitalisme tidak hanya dibentuk karena faktor revolusi industri pada abad ke-18-19 di Eropa melainkan juga karena faktor agama atau pengejawantahan ajaran agama dalam kehidupan budaya sehari-hari. Ajaran Calvin telah mampu diterjemahkan oleh para pengikutnya sebagai bagian dari budaya mereka, yaitu budaya bekerja keras, hemat, disiplin, jujur, suka investasi dan lain-lain sebagai sikap yang diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran atau kekayaan penganutnya.

3. Unsur Budaya Lokal pada Kawasan Semi-periphery sebagai Tantangan dalam Kurikulum IPS.

Perlu disadari oleh pengembang kurikulum IPS bahwa unsur-unsur budaya lokal juga mempengaruhi kemajuan bangsa-bangsa di Asia Timur. Kondisi ini merupakan materi yang menarik untuk mengembangkan perspektif global peserta didik dalam kurikulum IPS. Selain Jepang seperti disebutkan di atas, China, Taiwan, Korea dan Singapura merupakan negara-negara Asia yang dikategorikan oleh pengamat ekonomi sebagai *macan Asia*. Kemajuan negara-negara tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya setempat selain karena faktor-faktor eksternal seperti kemajuan teknologi dan ekonomi global. Secara kultural, negara-negara yang terletak di kawasan Asia Timur tersebut memiliki ikatan budaya yang kuat dan berasal dari sumber yang sama. Korea, misalnya, mendapat pengaruh budaya dari daratan China. Seperti halnya Jepang, Korea juga memiliki tradisi budaya yang hampir sama dengan daratan China. Demikian juga dengan Taiwan dan negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indochina (Viennam, Laos dan Kamboja) serta Singapura memiliki ikatan budaya yang kuat dengan daratan China.

Dalam menganalisis kemajuan atau kemunduran ekonomi Asia, para ahli ekonomi menyebut unsur-unsur budaya Asia tersebut sebagai *Asian Values* atau nilai-nilai Asia. Lucian W. Pye, (2000)¹³, misalnya, menyebut *Asian values* itu berasal dari nilai-nilai budaya setempat terutama nilai *Confusianisme dan Taoisme* di China, *Tokugawa* di Jepang atau nilai-nilai lokal pada bangsa-bangsa lainnya. Menurut Pye, *Asian values* itu tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi bangsa-bangsa tersebut, sebab di antara nilai-nilai itu terdapat hal-hal yang sifatnya menghambat. Misalnya, budaya konfusianisme ternyata tidak menghormati semangat kerja seperti halnya etika Protestan menurut analisis Max Weber. Sebagian masyarakat China di daratan China tidak memiliki semangat untuk mengembangkan

¹³ Lucian W. Pye, 2000, Asian Values, From Dynamos to Dominos? dalam Harrison and Huntington, 2000, *Culture Matter*, op.cit. pp. 245-255.

kegiatan ekonomi dibandingkan dengan masyarakat China perantauan yang tersebar di Taiwan serta negara-negara Asia Tenggara. Akibatnya, kemajuan masyarakat China perantauan jauh lebih cepat dibandingkan dengan masyarakat China daratan, walaupun pada perkembangan terakhir ini China daratan menunjukkan kinerja ekonomi yang luar biasa. Ternyata permasalahannya adalah bahwa masyarakat China perantauan mampu meterjemahkan nilai-nilai Confusianisme dalam praktek bisnis mereka dengan cara menjadi pedagang. Walaupun Confusianisme menempatkan pedagang dalam posisi yang rendah, seperti halnya kebudayaan Jawa di Indonesia, masyarakat China perantauan memilih profesi pedagang sebagai jalan hidup. Menurut Pye, nilai-nilai Confusianisme yang diaplikasikan oleh masyarakat China tampak dalam beberapa hal berikut:

1. Keyakinan pada nasib baik (*good luck*). Keyakinan tersebut telah mendorong mereka mengembangkan cara pikir yang *outward looking* atau berorientasi keluar. Orientasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan baik yang dapat diraih untuk meningkatkan kualitas hidup. Walaupun kerja keras tidak dihargai dalam budaya confusianisme, masyarakat China berusaha mencari kesempatan yang baik untuk meningkatkan *good luck*.
2. Kebudayaan confusianisme sangat menghormati pentingnya peningkatan diri serta motivasi untuk maju. Oleh akrena itu, kebudayaan ini menghargai *need for achievement*, sebagai konsep yang dikemukakan David McClelland, sebagai hal yang sangat penting dan merupakan bagian dari nilai budaya China sejak lama. Dalam kehidupan sehari-hari orang tua China sangat memperhatikan pendidikan anaknya dengan cara mendorong mereka untuk sukses dalam berbagai lapangan hidup dan mendidik mereka untuk meraih cita-cita tinggi.
3. Kebudayaan China juga sangat menjunjung tinggi *dependency* atau ketergantungan dan menempatkan keluarga sebagai satuan penting untuk meingkatkan *need for achievement*. Dalam keluarga, posisi anak laki-laki dianggap lebih penting dibandingkan dengan anak perempuan. *Achievement*

diberikan di dalam keluarga dengan ikatan yang kuat dan oleh karena itu sering kali keluarga China tidak mempercayai orang yang berasal bukan dari lingkungan keluarga. Dalam kerangka bisnis dan ekonomi, para pedagang China cenderung melakukan kerjasama dengan sesama mereka terutama yang berada dalam ikatan kekeluargaan. Hal ini berbeda dengan keluarga Jepang, dimana *achievement* diukur dari keberhasilannya bersaing dengan anggota keluarga lain dan jika dalam persingan itu mereka memenangkannya maka mereka akan menjadi kepala keluarga yang baru.

4. Kebudayaan China juga sangat menjunjung tinggi *guanxi* atau hubungan yang sifatnya personal yang didasarkan atas persamaan identitas. Walaupun di antara yang berhubungan itu bukan berasal dari keluarga yang sama, mereka dapat saja menjalin *interlink* yang erat karena persamaan asal-usul kota tempat tinggal atau ikatan budaya lainnya. Budaya ini kemudian dipraktekkan dalam ekonomi dan perdagangan melalui jaringan perdangan yang jauh lebih luas dari lokasi tempat tinggal ke kawasan di luar darataan China. Maka jadilah kawasan Asia Timur dan Tenggara kawasan dalam jaringan perdangan yang dikuasai oleh para pedagang dan pengusaha yang memiliki kebudayaan Confusianisme.

Kebudayaan tersebut diaplikasikan oleh para pendukung kebudayaan China di Asia Timur dan Tenggara untuk mengembangkan jaringan bisnis. *Interlinked* ekonomi menurut pendapatnya Kenichi Ohmae (1990)¹⁴ telah dipraktekkan oleh masyarakat pendukung kebudayaan Confusianisme dengan cara membangun jaringan bisnis dalam berbagai sektorseperti perbankan, jasa, manufaktur dan lain-lain. Dunia tanpa batas serta terbentuknya regionalisasi ekonomi sebenarnya telah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa di Asia Timur dan Asia Pasifik karena faktor budaya yang mereka miliki.

¹⁴ Kenichi Ohmae, 1990, *The Borderless World, Power and Strategy in the Interlinked Economy*, Harper Bussiness, USA.

Kini di era global, masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang unggul sudah mampu mengembangkan jaringan bisnis global dengan mengubah serta mengembangkan kebudayaan yang mereka miliki menjadi lebih relevan dengan tuntutan global. Masyarakat China pendukung *confusianisme* tentu saja tidak hanya bekerja sama di antara sesama mereka melainkan juga sudah membuka diri untuk membangun *interlink* dengan system atau kekuatan ekonomi lainnya. Kooperasi atau kerjasama dibuka lebih luas. Demikian juga dalam organisasi yang semula hanya menempatkan unsur-unsur internal juga dibuka menjadi sebuah organisasi yang tanpa batas. *Boundaryless Organization* seperti dikemukakan oleh Ashkenas dkk (2002)¹⁵ merupakan sebuah tuntutan baru di era global. Batas-batas negara yang dulu menjadi penghalang bagi pelaku bisnis untuk melakukan transaksi serta membangun jaringan dapat dibongkar dengan membangun jaringan organisasai yang luas yang menghimpun berbagai pihak yang berkementingan, baik yang berada dalam satu negara atau satu system melainkan dengan negara lainnya dengan system yang berbeda.

Untuk membangun jaringan organisasi tanpa batas itu diperlukan penguasaan teknologi informasi. Kini teknologi informasi menjadi alat utama untuk menghubungkan serta mengorganisir sektor-sektor atau unsur-unsur bisnis menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Namun demikian, untuk menggunakan teknologi informasi menjadi alat yang efektif memenangkan persaingan di era global serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak diperlukan manajemen informasi yang baru. Wildon (1997)¹⁶ dalam bukunya *The Information Edge*, mengembangkan beberapa strategi dalam management untuk mengelola informasi teknologi. Pada dasarnya, model manajemen informasi di era global, terutama untuk memenangkan persaingan global, harus memperhatikan berbagai aspek seperti 1) pemahaman mengenai manajemen informasi, pemahaman mengenai bidang usaha, pemahaman

¹⁵ Ashkenas, et al, 2002, *The Boundaryless Organization, Breaking the Chains of Organizational Structure*, Jossey-Bass, San Francisco. Ppxvii-xxi.

¹⁶ Wilson, 1997, *The Information Technology, Successful Management Using Information Technology*, Pitman Publishing, Melbourne.

mengenai keunggulan kompetitif dan nilai tambah, *cost and benefits*, spesifikasi usaha, dan lain-lain.

Kini di era global dengan nilai-nilai budaya yang dianutnya negara-negara seperti Korea, Taiwan, Hongkong (kini bagian dari RRC) serta Singapura telah masuk ke dalam negara *semiperiphery* menurut kategori Wallerstein. Negara tersebut memang belum masuk menjadi negara maju seperti Jepang. Tetapi mereka tidak lagi dapat digolongkan ke dalam negara berkembang sebab mereka sudah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia dan dunia. Korea Selatan, misalnya, telah menempati ranking kesebelas kekuatan ekonomi dunia, walaupun belum bisa mensejajarkan diri dengan Jepang. Demikian juga dengan Taiwan, China dan Singapura merupakan pemain ekonomi yang kuat di kawasan Asia-pasifik. Faktor-faktor budaya seperti dijelaskan di atas merupakan salah satu sumbangan positif bagi terbentuknya nilai-nilai bisnis yang diaplikasikan oleh para pelaku bisnis di Asia Timur dan Tenggara.

4. Nilai-nilai Budaya Lokal dan di Kawasan Periphery sebagai Tantangan Dalam Kurikulum IPS.

Para pengembang kurikulum IPS dihadapkan pada tantangan tentang pentingnya memasukkan unsur-unsur budaya lokal yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kemajuan masyarakat di era global. Pada negara-negara yang digolongkan ke dalam kelompok periphery, nilai-nilai budaya sering kali menjadi penghambat bagi kemajuan, walaupun unsur budaya tersebut bisa merupakan materi menarik dalam kurikulum IPS. Bangsa-bangsa di Afrika, Asia Selatan dan Baratdaya, serta Amerika Latin, memiliki nilai-nilai budaya yang terbentuk dalam perkembangan sejarah mereka. Mereka sebenarnya memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. Akan tetapi, nilai-nilai tersebut lebih banyak diaplikasikan ke dalam serta lebih banyak digunakan untuk mengenang kejayaan masa lalu. Akibatnya, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah masa kini yang mereka hadapi

termasuk dalam merencanakan masa depannya. Dalam analisisnya mengenai keadaan ekonomi negara-negara di Asia, khususnya negara-negara Asia Selatan, Gunnar Myrdal (1968), dalam bukunya *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nation*, seperti dikutip oleh Lawrence Harrison, (2000)¹⁷, menyatakan bahwa faktor budaya, terutama yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, merupakan faktor penghambat bagi terjadinya modernisasi di negara-negara Asia Selatan. Hambatan tersebut tidak hanya dalam kegiatan yang bersifat entrepreneurship melainkan juga dalam bidang politik serta perilaku social. Sebagai contoh, sistem kasta di India cenderung mempertahankan kondisi yang sudah buruk menjadi semakin buruk, tidak produktif, dan bahkan cenderung melahirkan korupsi dan nepotisme.

Di negara-negara Islam, nilai-nilai budaya juga menjadi penghambat. Adanya perlakuan yang berbeda terhadap perempuan telah memperkuat *inequality* dalam kehidupan masyarakat. Di negara-negara Arab yang kaya, misalnya, wanita ditempatkan dalam strata bawah, tidak berpendidikan, dan cenderung bekerja di rumah. Di negara-negara Asia Tenggara, yang sebagian beragama Islam, faktor budaya juga telah menjadi penghambat kemajuan. Di Indonesia, misalnya, sebagian kelompok etnis tertentu memiliki etnosentrisme yang tinggi, lebih melihat ke dalam, dan cenderung bertempat tinggal dalam wilayah kelahirannya atau tidak memiliki tradisi untuk bermigrasi atau melihat peluang di tempat lain. Akibatnya, hambatan-hambatan budaya yang dihadapi oleh berbagai kelompok etnis di Asia Tenggara ini telah memberi jalan, peluang atau kesempatan pada kelompok etnis China perantauan untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang ada. Mudah dipahami, apabila kegiatan ekonomi di kawasan ini dikuasai oleh kelompok etnis China yang secara historis sudah lama bertempat tinggal di kawasan ini dan secara kultural memiliki nilai-nilai budaya yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi.

¹⁷ Lawrence Harrison, (2000)¹⁷, 'Promoting Progressive Cultural Change', dalam Lawrence Harrison, (2000) *Culture Matters*, *op.cit.* pp. 297-306

Di Afrika, sebagian besar bangsa-bangsa di kawasan ini masih sangat miskin, ekonomi tidak berkembang, konflik antarsuku serta antarnegara sering terjadi. Akibatnya, kawasan ini sejak lama menjadi wilayah eksploitasi negara-negara Eropa. Terlepas dari faktor imperialisme Eropa atas kawasan ini, bangsa-bangsa Afrika sudah lama dikungkung oleh nilai budaya mereka sendiri. Menurut Daniel Etoungga Manguelle (2000)¹⁸, nilai-nilai budaya Afrika yang menghambat kemajuan di antaranya:

- Tradisi otoriter serta pemerintahan yang sangat sentralistis.
- Lebih memusatkan pada masa lampau, masa kini dan bukan pada masa depan.
- Penolakan terhadap “tirani waktu”.
- Memiliki prinsip “bekerja untuk hidup dan bukan hidup untuk bekerja”.
- Adanya penekanan terhadap inisiatif perorangan, sukses individu serta upaya saving (menabung).
- Masih banyak kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat tahayul.

Hambatan nilai budaya terhadap perkembangan ekonomi tidak hanya ditemukan di negara-negara berkembang melainkan juga di negara-negara Eropa. Sebagai contoh, masyarakat Sicilia di Italia Selatan, yang kini menjadi kawasan yang paling terbelakang di Italia, juga memiliki hambatan budaya. Nilai budaya masyarakat Sicilia menentang semangat kooperasi, tetapi sebaliknya juga mereka tidak suka dengan semangat bersaing yang dimana mereka dianggap sebagai tindakan agresif. Bahkan kawasan ini telah melahirkan organisasi mafia, sebuah organisasi yang memusatkan pada kegiatan kejahatan internasional.

5. Penutup.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat di era global. Kondisi tersebut merupakan materi yang

¹⁸ Daniel Etoungga Manguelle (2000). ‘Does Africa Need a Cultural Adjustment Program’, dalam Lawrence Harrison, 2000, *Cultures Matters*, *op.cit.* pp. 65-75.

menarik yang bisa dikembangkan oleh para pengembang kurikulum IPS guna membekali para siswa perspektif global. Perlu disadari oleh para pengembang kurikulum IPS bahwa bangsa-bangsa yang memiliki kemampuan mengali nilai-nilai positif budaya lokalnya pada akhirnya mampu memenangkan persaingan di era global. Negara-negara Eropa Barat, Jepang, Amerika Utara, beberapa negara Asia Timur, telah menunjukkan bahwa mereka mampu berperan aktif di era yang penuh persaingan serta kerjasama dalam berbagai system itu. Bangsa-bangsa lainnya di luar yang disebutkan di atas masih dihadapkan pada berbagai persoalan budaya mereka yang tidak kondusif bagi pembangunan ekonomi. Harrison (2000)¹⁹ dalam bukunya mengenai *Pan-American Dream* (1999) menganalisis budaya progresif dan budaya yang statis. Budaya progresif cenderung membawa kemajuan, sementara budaya statis menjadi penghambat bagi kemajuan ekonomi. Terdapat sepuluh nilai, sikap dan *mind-sents* yang membedakan antara budaya progresif dan budaya statis. Kesepuluh budaya yang bisa dikaji dalam kurikulum IPS, sebagai berikut:

1. Berorientasi pada waktu: budaya progresif menekankan pentingnya waktu; budaya statis lebih melihat masa kini dan masa lalu. Orientasi masa depan merupakan bagian dari budaya progresif.
2. Bekerja adalah sangat penting untuk membangun hidup menjadi lebih baik pada budaya progresif, tetapi hal itu menjadi beban pada budaya yang statis. Pada budaya progresif, bekerja merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, serta kecapakan dan kreatifitas dan perolehan sangat dihargai tidak hanya secara finansial melainkan juga kepuasan dan citra diri.
3. Hemat merupakan sokoguru dalam investasi serta rasa aman dalam keuangan pada budaya progresif, tetapi hal itu merupakan ancaman bagi masyarakat yang mempertahankan status quo berbudaya statis.

¹⁹ Lawrence Harrison, (2000)¹⁹, 'Promoting Progressive Cultural Change', dalam Lawrence Harrison, (2000) *Culture Matters*, *op.cit.* pp. 297-306

4. Pendidikan merupakan kunci utama menuju sukses pada kebudayaan progresif, tetapi hal itu dianggap tidak penting bagi masyarakat pendukung budaya statis, kecuali hanya bagi kelompok elit.
5. Jasa baik serta prestasi (merit) sangat penting untuk meningkatkan citra diri pada budaya progresif, sedangkan bagi pendukung budaya statis koneksi dan kekeluargaan merupakan hal yang sangat penting.
6. Masyarakat: Dalam budaya progresif identifikasi diri serta keterpercayaan (trust) jauh lebih luas daripada hanya di lingkungan keluarga, sedangkan di budaya statis hal itu hanya terbatas dalam lingkungan keluarga dekat. Dalam budaya terakhir ini identifikasi diri sering menjurus pada tindakan korupsi dan nepotisme.
7. Kode etik dalam masyarakat pendukung budaya progresif jauh lebih mendetil dan dihargai dibandingkan dengan budaya statis. Negara-negara yang demokratis cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah menurut *Index Persepsi Transparency International*.
8. Rasa keadilan dan permainan yang fair (*fair play*) merupakan ekspektasi interpersonal yang bersifat universal pada budaya progresif. Dalam budaya statis, keadilan, peningkatan prestasi diri, sering kali menjadi jalan bagi terjadinya korupsi.
9. Otoritas cenderung penyebar secara horizontal pada budaya progresif, sebaliknya hal itu sering memusat secara sentralis pada budaya statis.
10. Sekularisme: Pengaruh institusi agama dalam kehidupan sipil sangat kecil pada masyarakat budaya progresif, hal sebaliknya terjadi pada budaya statis.

Daftar bacaan.

- Ashkenas, et al, 2002, *The Boundaryless Organization, Breaking the Chains of Organizational Structure*, Jossey-Bass, San Francisco.
- Doll, 1993, *A Post-Modern Perspective on Curriculum*, tersedia dalam <http://www.great-ideas.org/30-5html>, tanggal 27 Februari 2005.
- Doll, 1995, 'Curriculum Possibilities, A "Post" Future', in Conrad and

Haworth, 1995, *Revisioning Curriculum in Higher Education*, Simon & Hustler Custom Publishing, Massacusset

- Grondona, Mariano 2000, 'A Cultural Typology of Economic Development', dalam Harrison and Huntington, 2000, *Culture Matters, How Values Shaves Human Progress*, Basic Books, New York.
- Harrison and Huntington, 2000, *Culture Matters, How Values Shaves Human Progress*, Basic Books, New York.
- Hatten and Rosenthal, 2000, *Reaching for the Knowledge Edge*, American Management Association, New York.
- Huntington, Samuel P, 1996, *The Clash of Civilizations, and the Remaking of World Order*, Prentice Hall, New York.
- Landes, David, 2000, 'Culture Makes Almost All the Difference', dalam Harrison and Huntington, 2000, *Culture Matter*,
- Lawrence Harrison, (2000)¹, 'Promoting Progressive Cultural Change', dalam Lawrence Harrison, (2000) *Culture Matters*,
- Micklethwait and Wooldridge (2000), *A Future Perfect, The Challenge and Hidden Promise of Globalization*, Crown Bussiness, New York.
- Manguelle, Daniel Etoungga (2000). 'Does Africa Need a Cultural Ajustment Program', dalam Lawrence Harrison, 2000, *Cultures Matters*,
- Ohmae, Kenichi 1990, *The Borderless World, Power and Strategy in the Interlinked Economy*, Harper Bussiness, USA.
- Parsons, Talcot, 1959, sebagaimana dikutip oleh Mariano Grondona (2000), A Cultural Typology of Economic Development, dalam Harrison and Huntington, 2000, *Culture Matters, How Values Shaves Human Progress*, Basic Books, New York.
- Pye, Lucian W, 2000, Asian Values, From Dynamos to Dominos?' dalam Harrison and Huntington, 2000, *Culture Matter*,
- Wallerstain, Immanuel, 'The Moderen World System', dalam Gardner, 2000, *Social Theory: Continuity and Confrontation A Reader*, Broadview Press, New York, pp. 528-535.
- Wilson, 1997, *The Information Technology, Successful Management Using Information Technology*, Pitman Publishing, Melbourne.